

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses mengembangkan potensi peserta didik, terlebih lagi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia telah mengatur pelaksanaan pendidikan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan di Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yakni mewujudkan peserta didik menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan, berakhlak mulia, berilmu serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab¹. Tujuan pendidikan diatas perlu diterapkan dalam segala jenjang termasuk pada pendidikan anak usia dini.

Tahapan pelaksanaan pendidikan disesuaikan berdasarkan tingkat perkembangan anak, tujuan yang akan dicapai serta kemampuan yang akan ditingkatkan. Berdasarkan jenjang pendidikan pada tahap usia 0 – 6 tahun, maka jenjang pendidikan yang akan ditempuh harus sesuai dengan upaya pembinaan yang akan dilakukan. Pada usia 0 – 6 tahun anak memasuki pendidikan anak usia dini. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 0 – 6 tahun. Jenjang pendidikan yang diterapkan yakni formal, informal dan nonformal². Termasuk

¹Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3. 2016. Bandung: Citra Umbara.

²Ibid, pasal 28

dalam pendidikan formal yakni Taman Kanak- kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA) dan sederajat. Pada pelaksanaan PAUD di Indonesia terdapat *Full Day School* dan *Half Day School*.

Berdasarkan penelitian terdahulu menyebutkan beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan sistem *full day school* di Amerika Serikat³. Achmed El Hisyam mengungkapkan bahwa sistem *full day school* merupakan program yang berasal dari Amerika Serikat dan diterapkan pada jenjang taman kanak- kanak. Beberapa faktor yang melatarbelakangi ialah, banyaknya orang tua terutama ibu yang memiliki anak dibawah usia 6 tahun, meningkatnya jumlah anak usia dini yang ditampung sekolah- sekolah umum, dampak pengaruh televisi dan kesibukan orangtua serta keinginan untuk memperbaiki nilai akademik⁴. Beberapa faktor diatas maka perlunya inovasi baru untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga pelaksanaan sistem *full day school* mampu menjadi alternatif dan terobosan menangani persoalan- persoalan di dunia pendidikan. Munculnya *full day school* merupakan bukti inovasi dari pendidikan.

Sistem pelaksanaan *full day school* diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) no 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Dipaparkan bahwasanya lama waktu sekolah dilaksanakan selama 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam 1 minggu⁵. Artinya anak berada disekolah mulai dari pagi sampai sore, sedangkan pada umumnya

³ Jamal Ma'mur A, *Full Day School Konsep Menejemen &Quality Control*. (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media. 2017). hlm 17

⁴ Ibid., hlm17

⁵ PERMENDIKBUD, No 23 tahun 2017 tentang hari sekolah, hlm. 3

sekolah di laksanakan pagi sampai siang (*half day program*)⁶. Peserta didik dengan sistem *half day program* akan memiliki waktu luang lebih dari anak yang memilih sistem *full day school*. *Half day school* adalah “sekolah reguler yang kebanyakan diterapkan sekolah di Indonesia, dengan waktu belajar mulai pagi hingga siang hari”⁷. Oleh karena itu pentingnya sebuah sekolah sebagai *base management of education* hal ini menjadikan sekolah sebagai pusat belajar, manajemen masyarakat dan manajemen keluarga⁸, sehingga kualitas pendidikan dapat dibentuk dari lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Program *full day school* merupakan program yang lebih fokus kepada pengaturan jadwal dan pendalaman. Menurut Baharudin jadwal kegiatan harus diperhatikan saat melaksanakan sistem *full day school* ditentukan sejak penyambutan siswa datang serta memastikan siswa pulang⁹. Jadwal yang dilaksanakan harus melalui penyusunan rencana yang strategis, hal ini untuk mewujudkan cita- cita suatu lembaga yang menerapkan sistem *full day school*. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Wahyu Sukartiningsih dalam bukunya Jamal Ma'mur A tentang *full day school* merupakan program pendidikan yang seluruh aktifitasnya berada di sekolah sejak pagi sampai sore hari¹⁰. Namun, pada pelaksanaannya penjadwalan yang dilaksanakan tidak

⁶ Jamal Ma'mur A. op.cit., hlm. 18

⁷ Ibid., hlm. 17

⁸ Budi. Taufik. 20 Juli 2017. *Mendikbud Beberkan Alasan Penereapan Full Day School di Semarang*. (Online) Pro Quest http://mendikbud.beberkan.alasan.penerapan.full.day.school.di_semarang). diakses tgl 10/11/18

⁹ Baharudin. *Pendidikan & Psikologi Perkembangan*. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2014). hlm. 227

¹⁰ Jamal Ma'mur A. *Full Day School Konsep Menejemen & Quality Control*. (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media. 2017). hlm. 52

hanya menambah waktu belajar melainkan menambah materi serta pendalaman materi sesuai kurikulum serta pengembangan jiwa anak.

Materi yang dikembangkan pada pelaksanaan sistem *full day school* pada umumnya didasari oleh pengembangan kognitif, sosial dan spiritual yang bermuara pada pendidikan karakter¹¹. Pengembangan agama, pelatihan bahasa misalnya Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, kegiatan ekstrakurikuler seperti seni tari, lukis, musik dan pengembangan minat bakat lainnya. Pemberian materi telah membagi jadwal sesuai dengan waktu belajar anak. Berdasarkan penelitian Wiwik Sulistyaningsih telah memaparkan bahwa jadwal kegiatan harian di TK *full day* berbeda dengan jadwal kegiatan di TK *half day*¹². Jadwal kegiatan pada program *full day* lebih lama dari jadwal kegiatan *half day*.

Penerapan *full day school* dianggap sebagai adopsi dari pembelajaran di pesantren, dimana anak didik selalu dalam pengawasan seorang gurunya. Pengawasan perkembangan anak oleh seorang guru dilakukan secara aktif dari waktu ke waktu. Interaksi antara guru dan murid di pondok pesantren berlangsung lama sehingga ada efek positif bagi perkembangan psikologis, keilmuan, moral dan agama anak¹³. Perbedaan yang nampak dari *full day school* dengan pesantren ialah dari segi kelembagaan, pengelolaan waktu serta materi yang diberikan, namun keduanya memiliki *output* pendidikan karakter.

Searah dengan penelitian Nur Hidayah, kesiapan implementasi sistem *full day school* dapat dilihat dari kesiapan kurikulum sekolah, pendidik dan tenaga pendidik, kesiapan peserta didik, sarana dan prasarana serta

¹¹Ariah. 2015. *Pembentukan Karakter Kemandirian Siswa Melalui Implementasi Islamic*. Didaktika Tauhidi ISSN 2442-4544 Volume 2 Nomor 2, hlm 121 diakses tgl 02/11/18

¹² Jamal Ma'mur A. Opcit., hlm. 34

¹³ Jamal Ma'mur A. Ibid., hlm 29

pembiayaan¹⁴. Pendidik merupakan salah satu poin yang harus di siapkan dalam pelaksanaan *full day school*. Berdasarkan Undang- Undang No. 20 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan¹⁵. Sehingga pendidik memiliki tugas dan amanah yang sesuai dengan Sisdiknas.

Guru menjadi sebuah pioner yang memegang kendali dalam peningkatan mutu pendidikan sebuah lembaga. Didukung oleh pernyataan bahwa guru juga orang yang mempunyai pengetahuan lebih serta mampu mengimplisitkan nilai - nilai didalamnya, mempunyai bekal pengetahuan sesuai tugasnya¹⁶. Guru adalah seseorang yang memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus menjadi tokoh dan model yang akan dianut serta menjadi panutan anak didiknya pada sebuah sekolah atau lembaga. Sebuah lembaga memerlukan mutu pendidikan, dimana mutu pendidikan merupakan “kemampuan pendidikan (sekolah) dalam mendayagunakan sumber - sumber yang ada untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin”¹⁷. Oleh karena itu suatu lembaga sangat perlu pendidik yang profesional.

¹⁴Nur Hidayah. (*Jurnal JPSD Vol 4 No. 1 Tahun 2017*). Kesiapan sekolah dalam implementasi prigram full day school. diakses tanggal 8 Oktober 2018

¹⁵Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 6

¹⁶ Haidar Putra Daulay. *Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. (Jakarta: Media Grup. 2007)

¹⁷ Ace, Suryadi dan H.A.R . *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016.) hlm 77

Menurut Ilyas kerja guru merupakan suatu penampilan hasil karya personal, baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi dan penampilan individu maupun kelompok kerja personal. Kinerja guru sendiri dapat diartikan suatu keberhasilan seseorang secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama periode tertentu¹⁸. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan tugas utama guru yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran anak, sehingga perlu guru yang professional untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas hanya dapat diwujudkan oleh guru yang memiliki kemampuan unggul dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya. Melalui pembelajaran yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Kualitas pendidikan akan maksimal jika didukung dengan pendidik yang profesional. Berdasarkan Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 39 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003: Guru atau Pendidik profesional merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan¹⁹. Seorang guru yang profesional wajib memiliki kompetensi, kompetensi guru dijelaskan dalam Undang – Undang Guru dan Dosen no 14 tahun 2005. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

¹⁸ Barnawi dan Mohammad A. *Kinerja Guru Profesional*. (Jogjakarta: Ar Ruzz Media. 2012), hlm. 14

¹⁹ Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara

Kompetensi guru yang harus dimiliki ada 4 kompetensi, yaitu 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi sosial, 4) kompetensi profesional. Kompetensi sosial yakni kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat sekitar. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10 September 2018 ditemukan bahwa di PAUD Al Mashduqie memiliki jumlah pendidik pada lembaga tersebut 3 orang dengan latar belakang budaya dan sosial yang berbeda. Pendidik di lembaga tersebut memiliki latar belakang seorang santri dari sebuah pesantren, sehingga sifat tawadhu' serta sopan santun dalam berbicara menjadi ciri khas seseorang yang berada di pondok pesantren.

Pada kemampuan sosial guru mengandung beberapa kompetensi inti diantaranya guru harus mampu bersikap objektif terhadap peserta didik, orangtua, lingkungan sekolah, perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, status sosial ekonomi dari wali murid²⁰. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orangtua atau wali peserta didik. Selain itu kompetensi sosial guru mengandung nilai mampu bertindak santun dengan masyarakat sekitar, memahami wilayah tempat bekerja, memahami nilai dan norma yang berlaku serta aktif dalam persatuan seprofesi.

²⁰Susilo, Setiadi. *Pedoman Penyelenggaraan PAUD*. (Jakarta: Bee Media Pustaka. 2016). hlm. 81

Nilai dalam kompetensi sosial guru dalam memahami perbedaan latar belakang peserta didik, di PAUD Al Mashduqie sendiri terdapat perbedaan budaya, sosial ekonomi dan pendidikan orang tua. Budaya sendiri merupakan definisi dari kata “kebudayaan” berasal dari bahasa sanskerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian ke-budaya-an dapat diartikan: “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Sedangkan budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa itu²¹. Kebudayaan yang ada pada masyarakat sebagai unsur pembentukan kepribadian anak – anak. Adapun pembiasaan oleh masyarakat baik norma dan perilaku akan terdapat dalam diri anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah yang dilakukan pada tanggal 10 September 2018, mendapatkan bahwa saat ini PAUD Al Mashduqie mempunyai 17 peserta didik. Keberagaman latar belakang budaya dan sosial ekonomi dari 17 peserta didik merupakan fenomena yang terjadi di PAUD Al Mashduqie. Terdapat peserta didik dari orangtua dengan penghasilan menengah ke atas dan menengah kebawah. Latar belakang sosial ekonomi dari data yang dihimpun sekolah terbagi berdasarkan Peraturan Gubernur No 75 Tahun 2017 tentang upah minimum kabupaten / kota di Jawa Timur tahun 2018, jika diambil pada wilayah Bangkalan. Berdasarkan data yang diperoleh dari sekolah menunjukkan 6 peserta didik termasuk dalam keluarga menengah ke atas dan 11 peserta didik lainnya tergolong dalam keluarga menengah ke bawah

²¹ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). hlm 181

Beberapa peserta didik berasal dari suku atau budaya yang berbeda yakni Suku Jawa, Suku Madura dan Suku Arab. Berdasarkan observasi pra lapangan, adanya perbedaan suku dan budaya serta ekonomi yang beragam dikarenakan adanya subsidi untuk peserta didik yang kurang mampu. Adanya kesibukan wali murid yang sama rata, yakni bekerja mulai pagi sampai sore hari. Latar belakang sosial ekonomi dan budaya yang beragam dari peserta didik baik dari segi bahasa dan latar belakang pekerjaan orangtua, hal ini pula menyebabkan guru merasa kesulitan dalam pelaporan perilaku anak yang dilakukan di sekolah. Oleh karena itu peneliti tertarik ingin mendalami fenomena yang terjadi.

Selain itu guru yang mengajar menggunakan sistem *full day school* dengan murid yang memiliki latar belakang yang beragam. Melalui kemampuan sosial yang dimiliki guru maka peneliti ingin mengetahui tindakan serta perlakuan guru kepada peserta didik dengan latar belakang yang beragam. Aspek kompetensi sosial yang harus dimiliki guru pendidikan guru pendidikan anak usia dini diantaranya bertindak objektif, tidak diskriminatif, tidak membedakan antara agama, suku, ras dan kondisi fisik.

Adapun aspek kompetensi sosial pada indikator berkomunikasi guru meliputi berkomunikasi secara efektif kepada tenaga kependidikan, wali murid dan masyarakat²². Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja yang memiliki keragaman sosial budaya seperti di PAUD Al Mashduqie. Oleh karena itu pentingnya penelitian kompetensi sosial guru yang akan diteliti, peneliti ini melihat kesesuaian dengan kompetensi sosial yang harus dimiliki

²²Supriadie dkk. *Komunikasi Pembelajaran*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.) hlm.

guru. Didukung dengan siswa yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi dan budaya yang beragam yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian yakni kompetensi sosial guru yang mengajar di sekolah *full day* yang memiliki murid dengan latar belakang sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, yakni budaya dari Suku Arab, Suku Madura dan Suku Jawa. Beriringan dengan wali murid yang berbeda latar belakang pendidikan serta sekolah dan tenaga pendidik dengan latar belakang pesantren di PAUD Al Mashduqie.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada uraian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kompetensi sosial guru yang mengajar di PAUD *Full Day School* di lingkup pesantren Al Mashduqie ditinjau dari latar belakang sosial ekonomi dan budaya peserta didik yang beragam ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan baru tentang pelaksanaan *full day school* di lingkup pesantren pada jenjang pendidikan anak usia dini khususnya pada mata kuliah Manajemen Penyelenggaraan PAUD, Profesi Keguruan dan Psikologi Pendidikan.
- b. Menambah wawasan pengetahuan guru tentang kompetensi guru khususnya pada aspek sosial serta manajemen pelaksanaan lembaga *full day school* di lingkup pesantren serta dapat dijadikan acuan informasi

2. Secara Praktis

a. Bagi Orangtua

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam memilih dan mendaftarkan anak di *full day school* pada lingkup pesantren di dunia pendidikan dan mengetahui kompetensi guru pada aspek sosial.

b. Bagi Peneliti

Sebagai sumber dasar penyusunan indikator penilaian guru dan bahan referensi bagi peneliti dan peneliti lain tentang kompetensi guru yang mengajar di sekolah *full day school* di lingkup pesantren dan memiliki peserta didik dari latar belakang sosial ekonomi, sosial budaya, pendidikan pesantren, yang berbeda serta dapat dijadikan sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang.